

PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN 2015

(Studi Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo Jalan
Soeharto Km. 5, Kalierang Selomerto, Telp/Fax. (0286) 321049, Wonosobo)

GIGIH PRATAMA AJI

S1 ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

SINOPSIS

Infrastruktur jalan memegang peran penting dalam sektor perekonomian dan pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan maka akan menghambat akses perekonomian, pendidikan, pembangunan, interaksi sosial budaya, maupun akses lalu lintas bagi masyarakat. Banyaknya kerusakan jalan hampir pada sebagian besar daerah di Kabupaten Wonosobo, pemerintah dianggap gagal membangun jalan sesuai standar teknisnya. Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Tahun 2015”* studi kasus di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo.

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dimana upaya penelitian untuk mendiskripsikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi pada suatu obyek penelitian dengan menggunakan teori fungsi manajemen sebagai pedoman didalam melakukan penelitian ini. Sehingga pembagian penelitian terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan seperti sumber daya manusia, anggaran, waktu, peralatan pendukung, dan standar pengawasan yang jelas. Sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus untuk meminimalisir kondisi tersebut. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintah bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Wonosobo, rekomendasi yang diberikan yaitu harus bisa menerima masukan dari masyarakat dalam proses perencanaan, membuat peraturan yang mengatur system pengawasan, melakukan evaluasi rutin terhadap pegawai, meningkatkan kualitas SDM, memperhatikan pentingnya rehabilitasi jalan dan bangunan pelengkap jalan, memperhatikan kondisi jalan di wilayah yang

jauh dari pusat perkotaan, dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pentingnya pemeliharaan jalan

Kata Kunci: fungsi pemerintah, pembangunan, pemeliharaan, infrastruktur jalan.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan infrastruktur yang vital dalam proses distribusi barang dan jasa, serta membuka akses untuk wilayah – wilayah yang terpencil terutama di Kabupaten Wonosobo. Hal ini sebagai indikator bergeraknya roda perekonomian yang merupakan mata rantai pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemeliharaan jalan dalam kota meliputi pekerjaan tambal sulam dan perbaikan bangunan penunjang jalan berupa pembersihan bahu jalan, gorong-gorong, pengecatan dan lain-lain.

Sarana transportasi jalan di Kabupaten Wonosobo tahun 2010 sepanjang 810,110 km terdiri dari jalan beraspal 628,655 km; jalan agregat 171,855 km; dan jalan tanah sepanjang 9,600 km. Dari

keseluruhan panjang jalan tersebut, dalam kondisi baik sepanjang 408,466 km; kondisi sedang sepanjang 190,392 km; kondisi rusak 158,877 km; dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 52,365 km. Untuk sarana transportasi jalan di tingkat desa sepanjang 90.254 km pada tahun 2005, kemudian meningkat menjadi 1.064,95 km pada tahun 2008 atau ada peningkatan rata-rata sebesar 5,86%, hal itu disebabkan secara bertahap ada penambahandana baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi untuk membangun dan merehabilitasi jalan desa guna kelancaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.¹

¹ *Adi Suryo, 2015, Kajian Transportasi di Kabupaten Wonosobo, <http://dokumen.tips/documents/kajian-transportasi-di-kabupaten-wonosobo.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2015, pada jam 14.56 WIB.*

Banyaknya kerusakan jalan hampir pada sebagian besar daerah di Kabupaten Wonosobo, pemerintah dianggap gagal membangun jalan sesuai standar teknisnya. Untuk itu, perlu segera dilakukan *engineering audit* terhadap penyelenggara jalan. Kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (*overloading*); Kedua, kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu pelaksanaan konstruksi jalan.

Hal ini menjadi dasar penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam menjalankan fungsi bidang pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Wonosobo.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo tahun 2015?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tahun 2015?

B. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Pemerintah Daerah

Secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata

“merintah” yang kemudian mendapatkan imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi ‘pemerintah’ berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara.
- b. Mendapatkan akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut².

Sedangkan pengertian menurut Mashuri Maschab, pemerintah daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah

tangganya sendiri dalam lingkungan Negara³.

2. Pemerintah dalam Pembangunan

Dalam suatu pembangunan perlu adanya manajemen yang baik supaya pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang diinginkan. George Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang ke arah tujuan – tujuan organisasional atau maksud – maksud yang nyata.⁴

² Syafiie, Kencana, Manajemen Pemerintahan, PT. Pertja, Jakarta, 1998, hal 15

³ Victor, M, Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2005, hal 21

⁴ Terry, G., Prinsip – prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

George Terry
mengklasifikasikan manajemen
menjadi 4 fungsi manajerial yaitu⁵:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses menggabungkan orang – orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi.

Dalam proses pengorganisasian

dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dari bidangnya masing – masing. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber – sumber yang diperlukan termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan – tujuan dapat tercapai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan

⁵ Ibid

standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian – pencapaian tujuan organisasi.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo

PEMBAHASAN

⁶ Ibid.

A. Pemerintah dalam Pembangunan

1. Perencanaan

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merencanakan anggaran untuk program tahun 2015 sebesar Rp 132.071.477.650,00 yang terdiri dari Program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 100.026.477.650,00; Program rehabilitasi jalan dan jembatan sebesar Rp 7.890.000.000,00; Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya sebesar Rp 7.988.000.000,00; Program pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 13.840.000.000,00; Program pengembangan dana dan informasi sebesar Rp 157.000.000,00; perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp 2.120.000.000,00; dan Program penataan, penguasaan, pemilikan,

dan Program pemanfaatan tanah sebesar Rp 50.000.000,00. Anggaran tersebut berasal dari APBD, DAK, BANPROV, APBD PROV.

Tahun 2015 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan perencanaan peningkatan jalan di Kabupaten Wonosobo sebanyak 73 ruas jalan dengan panjang total 99,104 km dengan anggaran sebesar Rp 93.923.295.650,00 yang berasal dari APBD, APBD L, DAK, BANPROV, dan BANPROV L.

Sedangkan dalam perencanaan rehabilitasi jalan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga melakukan perencanaan rehabilitasi berkala di 3 jalan di kabupaten Wonosobo, yaitu Jalan wringinanom – damarkasih, Jalan kepil - dempel – kalibawang, dan Jalan semayu – bumitirto dengan panjang total 4,594

km. Sedangkan perencanaan rehabilitasi rutin jalan sebanyak 180 ruas di jalan se Kabupaten Wonosobo. Total anggaran rehabilitasi jalan di Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 7.890.000.000,00 yang berasal dari APBD.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pelaksanaannya dibentuk organisasi – organisasi sebagaimana petunjuk yang telah ditetapkan. Organisasi – organisasi tersebut seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3. Pelaksanaan

Realisasi anggaran yang diperoleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo tahun 2015 sebesar Rp 104.902.648.703,00 atau hanya terealisasi sebesar 79,43 % dari anggaran yang direncanakan. Realisasi anggran tersebut terdiri dari Program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 75.881.091.800,00 (75,86%); Program rehabilitasi jalan dan jembatan sebesar Rp 5.998.250.100,00 (76,02%); Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya sebesar Rp 7.479.704.403,00 (93,64%); Program pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 13.306.971.000,00 (96,15%); Program pengembangan dana dan informasi sebesar Rp 150.368.400,00 (95,77%);

perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp 2.086.263.000,00 (98,40%); dan Program penataan, penguasaan, pemilikan, dan Program pemanfaatan tanah anggran yang direncanakan tidak terealisasi. Berdasarkan ratio kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebesar 89,30 %. Realisasi anggaran tersebut berasal dari APBD, DAK, BANPROV, APBD PROV.

Sedangkan pelaksanaan peningkatan jalan di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 mencapai 66 ruas jalan dengan panjang 86,246 km atau 87,02% dari 73 ruas jalan yang direncanakan. Terdapat 7 ruas jalan yang tidak terlaksana, yaitu jalan rejosari – sikatok, jalan binangun – watumalang, jalan randusari, rehab jalan kasiran – pacarmulyo, jalan PLN – dieng wetan, jalan rejosari – sikatok, dan jalan lingkungan

kalikuning. Total anggaran peningkatan jalan sebesar Rp 71.205.387.800,00 atau 75,53% dari perencanaan anggaran yang berasal dari APBD, APBD L, DAK, BANPROV, BANPROV L.

Rehabilitasi jalan di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 yang terdiri dari rehabilitasi berkala yaitu rehabilitasi jalan wringinanom – damarkasih, rehabilitasi jalan kepil – dempel – kalibawang, jalan semayu – bumitirto dengan panjang total mencapai 4,594 km, dan rehabilitasi rutin jalan se Kabupaten Wonosobo sebanyak 180 ruas dapat terlaksana dengan capaian 100 %. Sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 5.998.250.100,00 atau 76,02 % dari anggaran yang direncanakan. Anggaran tersebut berasal dari APBD.

4. Pengawasan

Sistem pengawasan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam hal ini hubungan antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengawas Lapangan saling bersinergi, artinya Pengawas Lapangan secara langsung dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksana dan melaporkan hasil pengawasan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga mempunyai kewenangan untuk untuk memberikan perintah kepada Pengawas Lapangan ketika mendapatkan tugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Selain itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga bisa mengawasi secara langsung terhadap pelaksana. Apabila terjadi perbedaan persepsi antara Pengawas Lapangan

dan pelaksana, maka Pengawas Lapangan harus melaporkan langsung kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan kemudian akan dilakukan rapat bersama atau rapat direksi untuk menghasilkan keputusan.

B. Pembangunan Jalan

1. Kerusakan Jalan

a. Kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan awal

Kerusakan akibat buruknya pelaksanaan pekerjaan awal dapat terjadi akibat kesalahan perencanaan, faktor kerusakan jalan akibat kesalahan perencanaan jalan tersebut diakibatkan oleh perencanaan drainase yang kurang maksimal sehingga air tidak dapat diarahkan ke saluran drainase yang kemudian merusak aspal. Selain itu adanya pihak penyedia jasa

yang bekerja kurang profesional dengan tidak mengikuti spesifikasi yang telah ditentukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

b. Kerusakan akibat pemakaian dan waktu

Jalan di Kabupaten Wonosobo sebagian besar dalam pemeliharaannya hanya dilakukan dengan cara *overlay* (pelapisan tambahan) dan tutup lubang. Sedangkan dengan cara tersebut kualitas dari hasil pemeliharaan jalan tidak optimal, karena dengan cara tersebut kualitas perkerasan jalan tidak akan sesuai dengan umur rencana jalan yang sudah ditentukan. Selain itu kerusakan jalan akibat pemakaian dan waktu juga disebabkan karena beban *overload* yang dibawa oleh kendaraan di ruas jalan Kabupaten

Wonosobo. Akibat beban yang *overload* tersebut maka perkerasan jalan akan mengalami kerusakan yang menimbulkan keretakan disetiap lapisan jalan.

c. Kerusakan akibat sebab – sebab khusus

Kerusakan jalan akibat sebab – sebab khusus biasanya terjadi akibat faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kinerja dari perkerasan jalan. Faktor – faktor lingkungan tersebut terdiri dari intensitas kadar air akibat cuaca dan temperatur. Pada tahun 2014 rata – rata suhu udara di Kabupaten Wonosobo antara 14,3 - 26,5⁰ C dengan curah hujan per tahun berkisar 1.660 – 4.049 mm/tahun. Sementara itu jumlah rata – rata hari hujan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo sepanjang

tahun 2014 adalah sebanyak 183 hari. Hal tersebut menyebabkan rembesan dari permukaan tanah yang lebih tinggi ke jalan, fluktuasi muka air tanah, dan infiltrasi air yang berasal dari permukaan perkerasan jalan dan bahu jalan.

2. Bangunan Pelengkap Jalan

Bangunan pelengkap jalan merupakan salah satu bangunan yang menunjang kualitas dan umur rencana jalan. Oleh sebab itu, bangunan pelengkap jalan sangat dibutuhkan disetiap jalan sebagai salah satu bangunan yang mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan. Beberapa bangunan pelengkap jalan diantaranya terdiri dari saluran drainase (gorong – gorong) dan bahu jalan.

Pada tahun 2015 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kabupaten Wonosobo melakukan pembangunan drainase di beberapa jalan di wilayah Kabupaten Wonosobo yang meliputi daerah Kota Wonosobo, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Wonosobo, dan Kecamatan Selomerto. Secara umum drainase jalan di Kabupaten Wonosobo berbentuk drainase alam dan drainase buatan.

Selain drainase, bangunan pelengkap jalan yang mempengaruhi fungsi dan kualitas jalan adalah bahu jalan. Bahu jalan adalah bagian jalan yang bersebelahan dengan perkerasan jalan, yang berguna untuk mendukung pondasi jalan. Bahu jalan juga membantu dalam pembuangan air yang berasal dari air hujan yang menyebabkan genangan. Fungsi bahu jalan terhadap kualitas

dan konstruksi jalan sebagai pendukung pondasi bawah jalan, membantu pembuangan air yang bersumber dari hujan atau sumber lainnya, memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping jalan, dan memperpanjang umur pelayanan jalan.

C. Kendala – kendala

Kendala – Kendala dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan inilah yang menyebabkan kurang efektif dan optimalnya pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menimbulkan efek kurang meratanya pembangunan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menghadapi banyak kendala terutama masalah anggaran dan kualitas SDM yang tidak sesuai

dengan jumlah pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Selain itu, kurang berkoordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat di wilayah – wilayah Kabupaten Wonosobo menyebabkan kurangnya informasi tentang kondisi jalan di masing – masing wilayah yang menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan maupun peeliharaan jalan. Terjadinya tumpang tindih jabatan di setiap bagian juga menjadi kendala di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Pembangunan jalan yang dilaksanakan bertahap serta waktu perencanaan dan pelaksanaan menjadi kendala pada program tersebut. Peralatan – peralatan yang minim juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya

pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Kurangnya SDM dan banyaknya program pembangunan dan pemeliharaan juga menyebabkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kesulitan dalam mengawasi pelaksanaannya. Selain itu tidak adanya Peraturan Bupati tentang pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan mengakibatkan SKPD yang berkaitan tidak memiliki standar pengawasan yang jelas.

KESIMPULAN

Pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo dalam peningkatan jalan mencapai 66 ruas jalan dengan panjang 86,246 km atau 87,02% dari 73 ruas jalan yang direncanakan. Total anggaran peningkatan jalan sebesar Rp

71.205.387.800,00 atau 75,53% dan rehabilitasi jalan mencapai 3 ruas jalan dengan panjang total mencapai 4,594 km, dan rehabilitasi rutin jalan se Kabupaten Wonosobo sebanyak 180 ruas dapat terlaksana dengan capaian 100 %. Sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 5.998.250.100,00 atau 76,02 %.

Sedangkan kendala yang dihadapi disebabkan oleh faktor SDM, anggaran, waktu, peralatan, standar pengawasan, sosialisasi terhadap masyarakat dan keadaan geografis.

SARAN

1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga harus bisa menerima masukan dari masyarakat sebagai *partner* dalam proses perencanaan. Sehingga apa yang mereka harapkan dapat terealisasi dalam pelaksanaannya.
2. Pemerintah daerah harus membuat peraturan yang mengatur system pengawasan, sehingga SKPD yang terkait memiliki standar pengawasan yang jelas. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan saat perencanaan maupun pelaksanaan.
3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga harus melakukan evaluasi rutin terhadap pegawai, sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pekerjaan selanjutnya.
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga harus meningkatkan kualitas SDM, sehingga tumpang tindih jabatan dalam pekerjaan dapat dihindari.
5. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga harus memperhatikan pentingnya rehabilitasi jalan maupun bangunan pelengkap jalan. Karena dengan minimnya jumlah ruas jalan yang direhabilitasi, maka secara berkelanjutan kondisi jalan akan bertambah rusak.
6. Pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi jalan di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, karena dengan hal

tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

7. Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pentingnya pemeliharaan jalan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara jalan meningkat.

[ine/backends/download.php](#), diakses
24 Oktober 2015

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*,
Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002.

Syafiie, K., *Manajemen Pemerintahan*,
Jakarta: PT. Pertja, 1998.

Terry, G., *Prinsip – prinsip Manajemen*,
Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Victor, M., *Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta:
Fisipol UGM, 2005.

Website:

Suryadi Lambali, 2015, *Pembangunan Nasional*, <http://lms.unhas.ac.id/clarol>